

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN**

(Studi di UPPA Polres Magetan)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TONY KURNIA CHRISTYANTO

NIM. 0910113043



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (Studi di UPPA Polres Magetan)

Identitas Penulis :

a. Nama : Tony Kurnia Christyanto

b. Nim. : 0910113043

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan

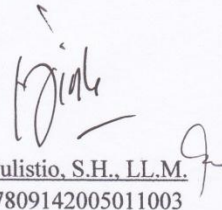
Disetujui tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Pahan Triyoso, S.H., M.H.
NIP. 195405171982031003



Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP. 197809142005011003

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,



Eny Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

**THE IMPLEMENTATION OF DETENTION AGAINST CHILD AS
THE DOER OF COPULATION CRIMINAL ACTION**

(The Study at UPPA Magetan Resort Police)

Tony Kurnia Christyanto

Register Number 0910113043

Faculty of Law, University of Brawijaya

TonyKurnia19@yahoo.co.id

Abstract

The author in this final paper attempts to understand the problem behind the application of detention against child as the doer of copulation criminal action. The background of research is that the child who stands before the court during proceeding process is frequently not treated in consistent to Act of Republic of Indonesia No. 3 of 1997 in Article 45 Verse (3) which states that child arrest must be separated from the adult. Research type is empirical research with sociological juridical approach. Result of research indicates that the member of UPPA Magetan Resort Police, in dealing with the application of detention against child as the doer of copulation criminal action, is failed to consider the use of Act of Republic of Indonesia No.3 of 1997 in Article 45 Verse (3) which asserts that child arrest shall be separated from adult arrest. Indeed, the application of this Act by UPPA Magetan Resort Police is not just what it is expected.

Keywords: Detention, child, copulation criminal action

Abstrak

Pada skripsi ini penulis akan mengangkat permasalahan pelaksanaan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Pemilihan permasalahan tersebut dilatar belakangi seringnya anak yang berhadapan dengan hukum. Selama menjalani proses peradilan anak tersebut tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana tercantum dalam UU RI No.3 Tahun 1997 pasal 45 ayat (3) bahwa tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian didapati anggota UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan masing menggunakan UU RI No.3 Tahun 1997, pada pasal 45 ayat (3) yang mengatur bahwa tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Namun dalam pelaksanaannya Anggota UPPA Polres Magetan belum dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata kunci: penahanan, anak, tindak pidana persetubuhan

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usia muda mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana anak beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.

Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, Kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,

¹ Hermawan, **Analisis Yiridis Tenatang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Kuningan** (online), Fakultas Hukum UNLA Repository, <http://repository.fhunla.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2013.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh seorang anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan Nomor Perkara B/64/V1/2013/SATRESKRIM bernama Alif Huda berumur 18 (delapan Belas) tahun, pelajar kelas 2 MA (sederajat SMA) terhadap Anita Tri Utami berumur 15 (lima belas) tahun, pelajar kelas 2 MTS (setingkat SMP) yang ditahan di Polres Magetan, penahanannya disatukan dengan tahanan dewasa dengan alasan anak merasa tidak memiliki teman jika ditahan di tempat penahanan khusus anak. Untuk menghadapi dan menanggulangi perilaku anak nakal perlu mempertimbangkan kedudukan anak yang mempunyai sifat ciri yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi perilaku anak tersebut.²

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Misalnya anak akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya anak tersebut menjadi pendiam dan tidak kreatif.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk bukti perhatian pemerintah menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi anak. Perhatian akan hak-hak anak dalam peradilan di Indonesia dijunjung tinggi, karena anak menurut undang-undang ini adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Ketentuan hukum

² Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 19 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.

mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam undang-undang ini telah diatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penempatan anak sementara yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di wilayah Magetan sering terjadi, ditunjukkan dari jumlah perkara yang ditanganai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan pada tahun 2011 hingga tahun 2013.³ Sebagai pembanding dilakukan pula prasurvey terhadap beberapa daerah di sekitar Magetan, yaitu di Kota Madiun dan Ponorogo.

Setelah melakukan prasurvey ditemukan data-data sebagai berikut, prasurvey pertama dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Madiun. Dari hasil Prasurvey dapat diketahui bahwa Kota Madiun dari tahun 2011 hingga tahun 2013 memiliki jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan lebih sedikit dibandingkan Magetan, yaitu 6 (enam) perkara. Modus yang ada di Madiun berbeda dengan yang ada di Magetan yaitu tidak adanya hadiah uang dan pulsa, hanya janji-janji akan bertanggung jawab. Polresta Madiun mempunyai masalah yang sama dengan Polres Magetan yaitu menempatkan anak satu sel dengan dewasa selama menjalani masa tahanannya, namun perkara yang ditangani lebih sedikit.⁴

Daerah kedua yang dipilih menjadi tempat prasurvey adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo. Dari hasil prasurvey dapat diketahui bahwa Ponorogo memiliki jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak

³ Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 19 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.

⁴ Hasil Wawancara dengan BRIPTU Heru anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Madiun pada tanggal 16 september 2013 pukul 09.30 WIB.

pidana persetubuhan lebih banyak daripada Magetan, yaitu 13 (tiga belas) perkara sedangkan di Magetan hanya 7 (tujuh) perkara, namun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo telah melakukan proses penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa.”

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pula “Penahanan terhadap anak dilakukan di LPAS.”

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo menempatkan tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ponorogo, di tempat ini terdapat blok khusus anak sehingga anak tidak ditempatkan satu sel dengan dewasa.⁵ Hal ini dilakukan karena di LPKS Kabupaten Ponorogo belum memiliki tempat khusus untuk tahanan anak.

Perbuatan anak yang bersifat melawan hukum, dirasakan mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, dan timbul perasaan tidak aman, karena itu perlu perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, sebab hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, meskipun terlibat tindak pidana. Kondisi ini akan membawa masalah mendasar karena dengan upaya penahanan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi upaya terakhir dan merupakan pengecualian hanya terhadap tindak pidana tertentu dan dalam situasi tertentu. Pemaparan diatas memotivasi penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar, mengingat anak adalah bagian dari generasi muda yang apabila tidak dilindungi akan merugikan masa depan bangsa.

⁵ Hasil Wawancara dengan AIPTU Istatik Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo, pada tanggal 17 september 2013, pukul 11.30 WIB.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di UPPA Polres Magetan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan?
3. Apa upaya UPPA Polres Magetan menanggulangi kendala-kendala dalam melaksanakan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di UPPA Polres Magetan, kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan, dan upaya UPPA Polres Magetan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden, data yang didapat berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan, arsip negara, jurnal, dokumen maupun bentuk-bentuk lain berkaitan dengan penelitian.
2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden di Polres Magetan khususnya anggota polisi Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak yang Berwenang dan pernah memeriksa pelaku tindak pidana persetubuhan.

Data sekunder adalah yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip negara, artikel, jurnal, makalah. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan melengkapi, mendukung, memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan focus penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari statistik jumlah perkara di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, berkas pemeriksaan kasus tindak pidana persetubuhan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan. Data tersier adalah Data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat di Kantor Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut.

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta browsing situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik Analisis Data, data dari penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan metode deskriptif analisis.⁷ Dalam penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan penahanan terhadap anak sebagai pelaku

⁶ *ibid*, hlm. 32.

⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 244.

tindak pidana persetubuhan. Kemudian dipaparkan secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Adapun tindak pidana persetubuhan yang ditangi oleh Kepolisian Resort Magetan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah:⁸

Tabel 4.1

Tentang Jumlah Kasus Tindak pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Magetan Tahun 2011-2013 :

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2011	3 Perkara
2	2012	2 Perkara
3	2013	2 Perkara
	Total	7 Perkara

(Sumber: data primer, diolah, 2013)

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka kasus persetubuhan anak dibawah umur yang ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan, jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dilihat dari tahun 2011 kasus persetubuhan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) hanya berjumlah 3 perkara saja. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah tersebut menurun menjadi 2 perkara, dan pada tahun 2013 perkara tersebut masih 2 perkara, jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terjumlah ada 7 perkara yang di tangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan.

Pelaksanaan penahanan terhadap anak sebagai prilaku tindak pidana persetubuhan

⁸ Hasil Wawancara dengan AIPTU Minarti, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 31 Agustus 2013, pukul 10.45 WIB.

di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan

Tabel 4.2

Perkara Anak yang Ditahan di Kepolisian Resort Magetan Tahun 2013

No.	Nomor Perkara	Identitas	Pasal yang dilanggar	Surat Perintah Penahanan	Tempat anak ditahan
1	B/64/VI/2013/ Satreskrim	Alif Huda, 18 Tahun, Pelajar Kelas 2 MA Magetan	Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002	No. SP.Han/ 170/VI/2013/ SATRESKRIM	Dijadikan satu dengan tahanan dewasa
2	B/65/VI/2013/ Satreskrim	Rizko Adi Kurniawan, 17 tahun, Pelajar Kelas 1 SMA 3 Magetan	Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 atau Pasal 287 KUHP	No.SP.Han/ 71/VI/2013/ Satreskrim	Dijadikan Satu dengan tahanan dewasa

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan Tabel diatas mengenai situasi perkara anak yang ditahan di Kepolisian Resort Magetan tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaku adalah Alif Huda, lahir di Magetan, 16 Nopember 1995 sekarang berusia 18 tahun, pelajar kelas 2 MA (setingkat SMA) melakukan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan bernama Anita Tri Utami, lahir di Magetan, 14 September 1998, Pelajar kelas 2 MTS (setingkat SMP). Perbuatan tersebut dilakukan sekiranya bulan Juni dan Oktober tahun 2012 di sebuah rumah yang masih masuk Ds. Tapen, Kec. Lambeyan, Kab. Magetan, atas kejadian tersebut orang tua/Wali korban melaporkan ke Polres Magetan pada tanggal 11 Juni 2013. Perbuatan tersebut dilakukan oleh sdr. AH dengan menggunakan bujuk rayu terhadap sdri. ATU dengan mengatakan “kamu sayang atau tidak, kalau sayang ayo melakukan persetubuhan”, dan

menggunakan janji-jani palsu dengan mengatakan “nanti kalau kamu hamil aku nikahi”. Berdasarkan keterangan diatas Unit PPA Polres Magetan melakukan Penahanan terhadap sdr.AH sesuai dengan surat perintah No. SP.Han/170/VI/2013/SATRESKRIM. Dalam masa penahanannya sdr. AH meminta kepada petugas untuk dipindah di sel dewasa karena merasa takut di dalam sel sendirian.⁹

2. Sebagai pelaku adalah Rizko Adi Kurniawan, Laki-laki, tanggal lahir 11 November 1996 (17 tahun), agama islam, pelajar kelas 1 SMA 3 Magetan, alamat Ds. Milangsari RT. 07/RW. 01 Kec. Panekan, Kab. Magetan melakukan persetubuhan terhadap Tsarazien Nurwahab Putri, Magetan, 04 Oktober 1998 (15 tahun) alamat Ds. Soetono No. 7 Magetan pada sekira bulan Desember tahun 2012 di sebuah penginapan di Sarangan, kec. Plaosan, Kab. Magetan. Dilaporkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WIB. Berdasarkan analisa yuridis tersangka memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 atau pasal 287 KUHP yaitu dengan sengaja dilakukan untuk melampiaskan nafsu birahinya, Menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengajak atau membujuk dengan mengatakn akan menikahi korban jika nantinya hamil, melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur pertama kali dilakukan tersangka RAK terhadap korban TNP sekira bulan Desember 2012 pada saat korban masih berusia 14 tahun yang tergolong belum dewasa dan pada saat itu korban masih duduk di kelas 3 SMP.¹⁰

Dalam kasus ini Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan tidak mengupayakan diversi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Pada Tingkat Penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri

⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 31 Agustus 2013, pukul 10.19 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 14 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB.

wajib diupayakan Diversi.”

Hal tersebut karena Tindak Pidana Persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Sehingga anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan diversi, karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “...diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.” Sehingga Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan melakukan penahanan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, dengan maksud pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.¹¹

Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan dan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Anggota Unit Perlindungan Perempuan Kepolisian Resort Magetan dapat dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Singkatnya waktu penahanan, hanya 30 hari

¹¹ Abintoro Prakoso, **Pembaharuan Sistem Peradilan Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 102.

Mengacu pada UU RI No. 3 Tahun 1997 yang masih digunakan di Kepolisian Resort Magetan, pada pasal 44 ayat (4) menyebutkan “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan keoda penuntut umum.” Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan merasa waktu yang hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari sangat singkat, sedangkan dalam mendapatkan saksi dan bukti-bukti guna menyelesaikan BAP membutuhkan waktu cukup lama.¹²

2. Waktu tersita oleh BAPAS

Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) huruf a UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan “BAPAS membantu tugas penyidik.” BAPAS dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari, Hal ini dirasa semakin menyingkat waktu Kepolisian Resort Magetan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan penyidikan. Dalam hal ini BAPAS dalam melakukan penelitian setelah menerima surat permintaan pembuatan laporan penelitian dari Kepolisian. Tersitanya waktu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Magetan dalam melaksanakan penyidikan karena tugas BAPAS yang harus mengumpulkan data dengan cara memanggil/bertemu pelaku, mendatangi/ mengunjungi rumah pelaku dan tempat-tempat lain yang ada kaitanya permasalahan pelaku, setelah memperoleh data pembimbing kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.¹³

Keperluan penyusunan BAP terkadang belum cukup hanya dari hasil penelitian BAPAS, seperti modus operandi yang dalam penelitian BAPAS terkadang belum ada. sehingga menuntut Anggota Unit Perlindungan

¹² Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

¹³ Madin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 148.

Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan untuk tetap melakukan penyidikan.¹⁴

3. Anak merasa takut berada diruang tahanan khusus anak sendirian.

Kepolisian Resort Magetan telah menyediakan tempat khusus anak ditahan selama proses penyidikan, namun anak merasa sepi dan takut berada di tempat tersebut karena tidak memiliki teman. Hal ini dikawatirkan akan mengganggu psikologi anak, kemudian Polisi menempatkan tahanan anak dengan tahanan dewasa.¹⁵ Hal ini sangat disayangkan karena dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.” Dengan alasan apapun seharusnya anak yang ditahan tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Dikhawatirkan masa depan anak-anak dapat menjadi lebih buruk. Kekhawatiran tersebut didasari dapat terjadinya prisonisasi terhadap anak, namun dalam ruang lingkup ini adalah ruang tahanan Kepolisian Resort Magetan bukan dalam ruang lingkup penjara. Di dalam prisonisasi terjadi sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku dari para tahanan dewasa, anak yang dijadikan satu dengan tahanan dewasa menjadi lebih jahat.¹⁶ Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat terdapat kemungkinan tahanan yang berada di Kepolisian Resort Magetan adalah pelaku residivis (pengulangan tindak pidana).

4. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Magetan

Kepolisian Resort Magetan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam melakukan penyidikan terhadap anak

¹⁴ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 159.

yang berhadapan dengan hukum. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS ini menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak selama anak ditahan untuk kepentingan penyidikan.¹⁷ namun Kepolisian Resort Magetan belum mendapatkan perintah resmi tentang penggunaan undang-undang tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan penyidikan.¹⁸

5. Belum ada koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak. Saat ini LPKS belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena undang-undang tersebut masih belum secara resmi digunakan di wilayah Magetan.¹⁹

Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Magetan Untuk Menanggulangi Kendala-kendala Dalam Melaksanakan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.

1. Kepolisian Resort Magetan berupaya lebih cepat dalam melaksanakan penyidikan guna melengkapi BAP tepat waktu.²⁰

Sesuai dengan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Apabila hal ini terjadi dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri atau merusak barang

¹⁷ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 168.

¹⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

bukti, sehingga semakin mempersulit Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan dalam melakukan penyelidikan dan penyusunan BAP.

2. Kepolisian resort Magetan berupaya bekerjasama dengan BAPAS dalam melaksanakan penyidikan agar menyelesaikan BAP tepat waktu.²¹

Sesuai dengan pasal yang disebut pada nomor 1 (satu) diatas, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembuatan Laporan Penelitian kepada BAPAS agar melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan data dengan cara memanggil/bertemu pelaku, mendatangi/ mengunjungi rumah pelaku dan tempat-tempat lain yang ada kaitanya permasalahan pelaku, setelah memperoleh data pembimbing kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.²² Dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS penyidik kemudian menyusun BAP, apabila dari hasil penelitian tersebut belum dapat memenuhi penyusunan BAP, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan akan melengkapi BAP dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku.

3. Kepolisian Resort magetan berupaya mempercepat proses penyidikan agar anak segera dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).²³

Sesuai dengan pasal 44 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak menyebutkan “ pelaksanaan penahanan anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Anggota Kepolisian Resort Magetan melakukan hal tersebut dengan maksud

²¹ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

²² M. Nasir Djamil, *Lok. Cit.*

²³ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

agar anak yang ditahan mendapatkan teman dan berada di lingkungan yang membuat anak merasa tidak sendiri dan tidak merasa takut karena memiliki teman. Hal ini mengurangi resiko anak mengalami tekanan saat menjalani proses peradilan pidana.

4. Kepolisian Resort Magetan berupaya menyiapkan diri seiring dengan diberlakukanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada 30 juli 2012 tersebut akan mulai berlaku pada 2014 ini. Dengan demikian Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga baru yang mendukung pelaksanaan undang-undang ini.

5. Kepolisian Resort Magetan berupaya melakukan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkaitan dengan penempatan anak sementara sebelum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara.²⁵

Karena dalam pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.” Dalam wilayah hukum Kepolisian Polres Magetan belum terdapat LPAS, sehingga Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan melakukan koordinasi dengan LPKS Kabupaten Magetan sebagai tempat anak sementara ditahan selama proses penyidikan pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Magetan.

²⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realita Pelaksanaan Penahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Anak sebagai pelaku Tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resort Magetan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) perkara. Pada tahun 2011 terdapat 3 perkara dengan umur antara 16 - 18 tahun yang penahanannya ditempatkan 1 sel dengan tahanan dewasa. Pada tahun 2012 terdapat 2 (dua) perkara dan tahun 2013 terdapat 2 (dua) perkara yang keseluruhannya ditempatkan satu sel dengan tahanan dewasa. Hal ini terjadi atas dasar permintaan anak tersebut yang merasa takut berada di tempat penahanan khusus anak dan polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan mengabulkan permintaan anak tersebut atas dasar kasihan. Hal ini bertentangan dengan pasal 45 ayat 3 UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan bertentangan juga dengan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Magetan dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi.

a. Waktu penahanan yang singkat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan berusaha lebih cepat dalam melaksanakan penyidikan agar BAP selesai tepat waktu.

- b. Waktu tersita oleh BAPAS yang harus melakukan penelitian kemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan adalah dengan bekerjasama dengan BAPAS dalam penyidikan agar BAP selesai tepat waktu.

- c. Anak merasa Takut berada di Ruang tahanan khusus anak sendirian.
Polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan berupaya mempercepat proses penyidikan agar anak segera dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sehingga mendapatkan teman yang seusianya.

- d. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Magetan

Kepolisian Resort Magetan berupaya menyiapkan diri seiring dengan diberlakukanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- e. Belum ada koordinasi antara Kepolisian Resort Magetan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Magetan.

Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan berupaya melakukan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkaitan dengan penempatan anak sementara sebelum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Saran

1. Polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan hendaknya lebih menimbang lagi keputusannya mengabulkan permintaan anak yang ingin disatukan dengan tahanan dewasa agar mendapat teman, mengingat dampak yang dapat timbul terhadap anak disaat dewasa nanti.
2. Kurang efektifnya anak ditahan di sel khusus seharusnya menjadi perhatian Polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres

Magetan, Sehingga tidak terdapat lagi anak yang ditempatkan satu sel dengan tahanan dewasa.

Daftar Pustaka

Buku:

Abintoro Prakoso, **Pembaharuan Sistem Peradilan Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi Undang-Undang**, Kencana Prenada mediagroup, Jakarta.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali pers, Jakarta, 2010

Alimirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung 2012.

Martiman Prodjohamidjojo, **Penangkapan dan penahanan**, Ghalia, 1982.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

_____, **Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Romli Atmasasmita, **Teori & kapita selekta kriminologi** (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2007.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Subekti dan R.Tjitrosoedibyo, **Kamus hukum**, Pradnya paramita, Jakarta, 1983.

Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Peraturan perundang-undangan:

Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2010 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Kongres PBB ke VII tentang *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33, disahkan pada tanggal 29 November 1985.

Konvensi Hak–Hak Anak (*United Nations Conventions on the Right of the Cild*), Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Nations Rules for the protection of juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990).

PERMEN (Peraturan Menteri) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet:

Adi, Penahanan Anak (online), Fakultas Hukum Sumatera Utara,
<http://repository.usu.ac.id>.

Hermawan, Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Kuningan (online), Fakultas Hukum
UNLA Repository, <http://repository.fhunla.ac.id>,

<http://polresmagetan.com/berita>